

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengeluaran konsumsi masyarakat merupakan salah satu variabel ekonomi yang memberikan kontribusi paling besar terhadap pendapatan domestik bruto (PDB), yaitu sebesar 60-70%. Hal ini menunjukkan bahwa untuk pengeluaran konsumsi masyarakat mempunyai peranan penting terhadap pendapatan yang diterima oleh pemerintah, bila dibandingkan dengan variabel lain seperti pengeluaran untuk investasi yang memberikan kontribusi sebesar 7-11% terhadap PDB (Indikator ekonomi Indonesia, BPS).

Sadono Sukirno (1996) mengemukakan bahwa pengeluaran konsumsi rumah tangga merupakan nilai pembelanjaan yang dilakukan oleh rumah-tangga untuk membeli berbagai jenis kebutuhannya dalam satu tahun tertentu. Belanja berbagai jenis barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, digolongkan sebagai konsumsi. Sedangkan barang-barang yang digunakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya dinamakan barang konsumsi.

Pola konsumsi masyarakat berdasarkan alokasi penggunaannya dapat digolongkan kedalam kelompok-kelompok penggunaan, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Pola konsumsi masyarakat Indonesia dalam kurun waktu dua puluh tahun hampir tidak mengalami perubahan. Pada tahun 1984 konsumsi masyarakat Indonesia sekitar 63,24 % dari konsumsinya dialokasikan

untuk makanan dan setiap tahun terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6,86% pada tahun 1993. (Dumairy, 1999 : 118)

Banyak alasan yang menyebabkan analisis makroekonomi perlu memperhatikan tentang konsumsi rumah tangga secara mendalam. Alasan *pertama*, konsumsi rumah tangga memberikan pemasukan kepada pendapatan nasional. Perlu diketahui, di kebanyakan negara pengeluaran konsumsi sekitar 60-75% dari pendapatan nasional. Alasan yang *kedua*, konsumsi rumah tangga mempunyai dampak dalam menentukan fluktuasi kegiatan ekonomi dari satu waktu ke waktu lainnya.

Seiring dari tahun ke tahun penduduk Indonesia selalu meningkat, kebutuhan masyarakat atas barang dan jasa juga turut meningkat. Pada pertengahan tahun 1997 sampai tahun 1998, konsumsi masyarakat di Indonesia sempat mengalami penurunan karena terjadi krisis nilai tukar rupiah yang terus mengalami penurunan (depresiasi), yang kemudian disusul dengan krisis moneter dan pada akhirnya berubah menjadi krisis ekonomi yang menimbulkan konsekuensi terhadap ketidakstabilan perekonomian Indonesia. Dari kejadian tersebut berdampak pada melemahnya daya beli masyarakat karena pendapatan masyarakat tetap sementara harga-harga barang dan jasa naik. Selain itu juga tingkat suku bunga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini menimbulkan konsumsi masyarakat mengalami penurunan, karena masyarakat lebih memilih menyimpan uangnya di bank dengan kompensasi bunga dari pada konsumsi. (Brilliant Vanda Kusuma, 2008 : 5)

Dari kontribusinya terhadap pembentukan PDB Indonesia, konsumsi rumah tangga mempunyai peranan yang sangat penting. Terlihat bahwa setiap tahunnya konsumsi sektor rumah tangga ini berkontribusi sekitar 60-70%. (Secara lebih rinci, data konsumsi masyarakat Indonesia selama beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 1.1). Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 1999, yaitu sebesar 73,94%. Pada tahun 1999 tersebut Indonesia sedang dalam kondisi pemulihan pascakrisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998. Tahun 1998 Indonesia mengalami krisis ekonomi dimana harga-harga naik dan daya beli masyarakat menurun. Namun kontribusi sektor konsumsi masyarakat terhadap pembentukan PDB tidak menurun, karena pada dasarnya pengeluaran konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia masih terfokus pada pengeluaran untuk bahan makanan pokok. Walaupun harga-harga cenderung meningkat pada saat itu, masyarakat tetap membutuhkan konsumsi bahan makanan pokok. Sehingga tingginya harga-harga bahan makanan pokok pada saat itu tidak mempengaruhi pembelian/konsumsi masyarakat.

Untuk tahun 1999, kontribusi pengeluaran konsumsi masyarakat terhadap pembentukan PDB Indonesia, tergolong yang paling tinggi, yaitu 73,94%. Angka yang sangat besar ini mengindikasikan bahwa daya beli masyarakat sudah kembali normal. Bahkan konsumsi sektor rumah tangga turut membantu pemulihan perekonomian Indonesia. Untuk tahun-tahun selanjutnya, pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia kembali ke kisaran 60% hingga 70%. Angka ini terlihat masih cukup tinggi dibandingkan kontribusi sektor lainnya terhadap pembentukan PDB Indonesia.

Tabel 1.1
Pengeluaran konsumsi Masyarakat Indonesia Periode 1994-2009
(Dalam Milliar Rupiah)

Tahun	Pengeluaran konsumsi	Total Produk Domestik Bruto (PDB)	Kontribusi konsumsi terhadap PDB (%)
1994	228.119	382.220	59,68
1995	279.876	454.514	61,58
1996	332.094	532.568	62,35
1997	387.171	627.695	61,68
1998	647.824	955.753	67,78
1999	813.183	1.099.730	73,94
2000	856.789	1.389.770	61,65
2001	1.039.650	1.646.320	63,15
2002	1.231.960	1.821.830	67,62
2003	1.327.080	2.013.670	65,90
2004	1.532.890	2.295.830	66,77
2005	1.785.600	2.774.280	64,36
2006	2.092.660	3.339.220	62,67
2007	2.510.500	3.950.890	63,54
2008	2.999.960	4.951.360	60,58
2009	3.290.840	5.613.440	58,62

Sumber : *International Financial Statistics, CD ROM* (Data diolah)

Tingginya kontribusi pengeluaran konsumsi sektor rumah tangga terhadap pembentukan PDB Indonesia mengindikasikan bahwa kecenderungan untuk mengkonsumsi (MPC) masyarakat Indonesia cenderung tinggi.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga memiliki porsi terbesar dalam total pengeluaran agregat. Misalnya, porsi pengeluaran rumah tangga di Indonesia pada tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) mencapai sekitar 60% pengeluaran agregat. Bahkan, pada awal tahun 1970-an porsi pengeluaran rumah tangga mencapai angka sekitar 70% dari pengeluaran agregat. Sedangkan pengeluaran pemerintah umumnya berkisar antara 10% sampai 20% pengeluaran agregat. Mengingat porsinya yang besar tersebut, maka konsumsi rumah tangga mempunyai pengaruh

yang besar pula pada stabilitas perekonomian. (Pratama Rahardja dan Mandala Manurung, 2008 : 41)

Melihat perkembangan pengeluaran konsumsi masyarakat Indonesia seperti yang telah dikemukakan diatas, tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang dapat mempengaruhi konsumsi masyarakat Indonesia. Tingginya konsumsi masyarakat dapat ditentukan oleh berbagai macam faktor. Keynes dalam Ackley (1973 :343) mengemukakan beberapa faktor objektif yang mempengaruhi konsumsi Indonesia diantaranya distribusi pendapatan, kredit cicilan konsumen, persediaan harta dan tingkat harga.

Nicholas Kaldor dalam Muara Nanga (2001:129) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi adalah pendapatan, selera, faktor social kultur, kekayaan, hutang pemerintah, *capital gain*, tingkat suku bunga, tingkat harga, kredit, *money illusion*, distribusi, umur, letak geografis, dan distribusi pendapatan.

Pada dasarnya faktor yang paling berpengaruh terhadap konsumsi adalah pendapatan, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat faktor-faktor lain yang cukup berpengaruh kuat terhadap konsumsi masyarakat. Salah satunya yaitu kebijakan fiskal oleh pemerintah. Ani Sri Rahayu (2010 : 1) mengemukakan bahwa:

Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah.

Dari kutipan diatas kita dapat menyimpulkan bahwa pemerintah dapat mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui kebijakan fiskal. Secara teoritis dikenal empat jenis kebijakan fiskal, yaitu pembiayaan fungsional (*the functional finance*), pendekatan anggaran terkendali (*the managed budget approach*), stabilitas anggaran (*the stabilizing budget*), dan pendekatan anggaran belanja berimbang (*balance budget approach*). (Ani Sri Rahayu, 2010 : 7)

Pada dasarnya kebijakan fiskal berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Sedangkan pengeluaran dan penerimaan pemerintah Indonesia seluruhnya dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Stabilitas dalam APBN harus tetap terkendali, dan untuk menstabilkan antara pengeluaran dan penerimaan dalam APBN ini diperlukan kebijakan fiskal oleh pemerintah. Apabila penerimaan lebih tinggi daripada pengeluaran, terjadi surplus anggaran. Namun apabila penerimaan lebih kecil dibandingkan pengeluaran, maka terjadi defisit anggaran.

Ada beberapa kelompok yang mencoba membahas mengenai pengaruh defisit anggaran yang didanai oleh hutang pemerintah terhadap perekonomian. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya yaitu kelompok Keynesian, Neoklasik, dan Ricardian. Kelompok Keynesian berpendapat bahwa defisit anggaran mempengaruhi perekonomian. Kelompok Neoklasik berpendapat bahwa setiap individu mempunyai informasi yang cukup, sehingga mereka dapat merencanakan tingkat konsumsi sepanjang waktu hidupnya. Menurut kelompok ini, defisit anggaran akan meningkatkan konsumsi dalam jangka panjang, dengan cara membebankan pajak pada generasi berikutnya. Kelompok Ricardian berpendapat

bahwa defisit anggaran pada dasarnya hanyalah pengalihan beban pajak dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Oleh karena itu, kaum Ricardian menganggap bahwa defisit anggaran tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap perekonomian. (Rogatianus Maryatmo, 2005 : 9)

Prinsip umum dari pendekatan *Ricardian Equivalence* adalah bahwa hutang pemerintah ekuivalen dengan pajak masa depan, dan jika konsumen cukup melihat ke depan, pajak masa depan akan ekuivalen dengan pajak saat ini. Logika ekuivalensi Ricardian tidak berarti bahwa seluruh perubahan dalam kebijakan fiskal tidak relevan. Perubahan dalam kebijakan fiskal mempengaruhi pengeluaran konsumen jika perubahan kebijakan itu mempengaruhi pembelian pemerintah saat ini dan masa depan. (N. Gregory Mankiw, 2003 :408-409)

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk menguji sejauh mana kebijakan fiskal mempengaruhi konsumsi masyarakat di Indonesia, yakni dengan melakukan pengujian model yang dikemukakan oleh Roger C. Kormendi. Adapun judul dari penelitian ini yaitu:

“Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Konsumsi Masyarakat Indonesia Tahun 1980-2009 (Penerapan Model dari Jurnal “*Government Debt, Government Spending, and Private Sector Behaviour*” oleh Roger C. Kormendi)”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- b. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- c. Bagaimana pengaruh *transfer payment* terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- d. Bagaimana pengaruh kekayaan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- e. Bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- f. Bagaimana pengaruh cicilan hutang pemerintah terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pendapatan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- b. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009

- c. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *transfer payment* terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- d. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kekayaan terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- e. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerimaan pajak terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009
- f. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh cicilan hutang pemerintah terhadap konsumsi masyarakat Indonesia periode 1980-2009

1.4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan kajian dalam mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan bidang ekonomi, khususnya Ekonomi Makro.

b. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dalam menentukan langkah-langkah yang perlu ditempuh guna meningkatkan kesejahteraan Indonesia, khususnya melalui peningkatan tingkat konsumsi masyarakat dan pengelolaan kebijakan fiskal oleh pemerintah.